

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erwiningsih, W., & Sailan, F. Z. (2019). *HUKUM AGRARIA DASAR-DASAR DAN PENERAPANNYA DI BIDANG PERTANAHAN* (Cet. Pertama, pp. 1–240). FH UII Press.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanag* (Ed. Rev, cet. 19, pp. 1–788). Djambatan. (Original work published 1973)
- Lubis, Mhd. Y., & Lubis, Abd. R. (2012). *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional* (Cet. Ketiga, pp. 1–580). CV. Mandar Maju.
- Muchsin, Koeswahyono, I., & Solihin. (2007). *HUKUM AGRARIA INDONESIA Dalam Perspektif Sejarah* (A. Gunarsa, Ed.; Cet. Pertama, pp. 1–136). PT Refika Aditama.
- Ridwan. (2021). *Hukum Pertanahan Islam* (Abdul Wachid B.S., Ed.; Cet. Pertama, pp. 1–220). STAIN Press. <https://repository.uinsaizu.ac.id/18672/1/Buku%20Hukum%20Pertanahan%20Islam.pdf>
- Sumardjono, M. S. W. (2007). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (P. Cahanar, Ed.; Ed. Rev, Cet. Kelima, pp. 1–246). Penerbit Buku Kompas. (Original work published 2001)
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (C. Verdiansyah, Ed.; pp. 1–310). Penerbit Buku Kompas.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Ctk. Keenam, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta Timur, 2019.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* (Cet. Pertama, pp. 1–603). Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.

Jurnal

- Fikahati Prasetya, & Muh. Afif Mahfud. (2023). Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum*, 39(1), 78–89. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30581>
- Hutagalung, S., Noor, M. Tauchid., & Jatmikowati, S. H. (2022). Land Certification Policy through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Malang Regency of Indonesia (Study on Policy Implementation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency). *International*

Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS), 03(08), 61–75. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2022.v3.8.9>

- Lubis, Ikhsan & Siregar, Taufik & Lubis, Duma & Adawiyah, Rodiatun & Lubis, Andi. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*. 8. 143-158. [10.31292/jta.v8i2.401](https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401).
- Putra, R. A., & Winanti, A. (2024). Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 835-852. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9178>
- Jamil, R. P., Ikhsan, E., & Sembiring, I. A. (2025). URGENSI IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK OPTIMALISASI PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN LANGKAT. *Journal of Science and Social Research*, VIII(2), 3068–3074.
- Saija, R., Letsoin, F. X. R. V., Akyuwen, R. J., & Radjawane, P. (2020). Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara. *SASI*, 26(1), 99–110. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.246>
- Sholiha, A. A., Istijab, & Mashuri, M. (2024). Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Dalam Menjamin Kepemilikan Tanah Yang Sah. *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(3), 257–272. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i3.120>
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51–68. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-%2068>
- Surayya, I. (2022). PENDAFTARAN TANAH DALAM HUKUM AGRARIA LAND REGISTRATION IN AGRARIAN LAW. *The Juris*, 6(2), 299–305. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.595>
- Tetama, A. R. (2023). Politik hukum pendaftaran tanah elektronik pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Tunas Agraria*, 6(1), 30–40. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.201>
- Wajdi, F., & Ramadhani, R. (2022). Legal Problems of Land Services Online. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3(1). <https://doi.org/10.55357/ijrs.v3i1.201>
- Yogatiyana, N., & Hidayatullah, M. A. (2022). Eksistensi Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah di Indonesia. *ANWARUL*, 2(4), 323–333. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i4.505>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Website

Dwi NH, Tingkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN Terapkan Sistem Sertifikat Elektronik, terdapat dalam <https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/09/165009821/tingkatkan-efisiensi-pendaftaran-tanah-kementrian-atr-bpn-terapkan> 9 Februari 2021. Diakses pada tanggal 16 Juli 2025 Pukul 20.00 WIB.

Hari. S, BPN Kota Bogor Deklarasikan Kelurahan Lengkap dan Launching Aplikasi DILO, terdapat dalam <https://nusantarapos.co.id/65912/bpn-kota-bogor-deklarasi-kan-kelurahan-lengkap-dan-launching-aplikasi-dilo/>, 7 Mei, 2021. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pada pukul 17.00 WIB.

Kantor Pertanahan Kota Bogor, Laporan Kinerja Tahun 2024, terdapat dalam <https://drive.google.com/file/d/1Dbv5Itx4N3sMAFglM0gxG-WGx0avB77u/view>, 14 Februari 2024. Diakses pada tanggal 3 November 2025 15.00 WIB.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Laporan Kinerja Tahun 2024, terdapat dalam <https://jabar.atrbpn.go.id/lk2024>, 31 Desember 2024. Diakses pada tanggal 3 November 2025 pukul 17.00 WIB.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Laporan Kinerja

Triwulan I 2025, terdapat dalam <https://jabar.atrbpn.go.id/lk2025twi>, 31 Maret 2025. Diakses pada tanggal 3 November 2025 pukul 16.00 WIB.

Muhammad Idris, Ternyata Ini Alasan Pemerintah Terapkan Sertifikat Tanah Elektronik, terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2021/02/05/110600226/ternyata-ini-alasan-pemerintah-terapkan-sertifikat-tanah-elektronik?Page=all> 5 Februari 2021. Diakses pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.

Pemerintah Kota Bogor, Sejarah Kota Bogor, terdapat dalam <https://kotabogor.go.id/detail/sejarah>. Diakses pada tanggal 3 November 2025 pukul 13.00 WIB.

Retno Ayuningrum, Supaya Nggak Ketinggalan Zaman, Layanan Pertanahan Wajib Serba Digital, terdapat dalam <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7435344/supaya-nggak-ketinggalan-zaman-layanan-pertanahan-wajib-serba-digital> 12 Juli 2024. Diakses pada tanggal 16 Juli 2025 Pukul 21.00 WIB.

Sumber Lain

Wawancara dengan Riki, S.H. Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Bogor, di Bogor, 25 April 2025.

Wawancara dengan Dede Taufik Kusdiana. Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Bogor, di Bogor, 30 Oktober 2025.

Wawancara dengan Yadi Kusmayadi. Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bogor, di Bogor, 30 Oktober 2025.

Wawancara dengan Eye Mulyadi, warga Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di Bogor, 29 Desember 2025.

Wawancara dengan Enang, warga Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di Kantor Pertanahan Kota Bogor, 29 Desember 2025.

Wawancara dengan Rinaldi, warga Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di Bogor, 29 Desember 2025.

Wawancara dengan Darmawan, warga Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di Kantor Pertanahan Kota Bogor, 29 Desember 2025.

Wawancara dengan Ade Nukharon, warga Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di Bogor, 29 Desember 2025.

Wawancara dengan Erna, warga Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di Kantor Pertanahan Kota Bogor, 29 Desember 2025.

Wawancara dengan Solihin, warga Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di Bogor, 29 Desember 2025.

Wawancara dengan Abdulah, warga Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di Kantor Pertanahan Kota Bogor, 29 Desember 2025.

Wawancara dengan Titin, warga Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di Bogor, 29 Desember 2025.

Wawancara dengan Agus, warga Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di Kantor Pertanahan Kota Bogor, 29 Desember 2025.